

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Millennium Development Goals (MDGs) adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disepakati pada bulan September 2000 yang diikuti oleh 198 negara bagian PBB untuk melakukan 8 tujuan kemajuan, yaitu:

- 1) Menghapuskan kebutuhan dan nafsu makan yang keterlaluhan;
- 2) Memberikan setiap orang pendidikan dasar;
- 3) Mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 4) Mencegah kematian bayi;
- 5) Bekerja pada kesejahteraan ibu;
- 6) Menghentikan penyebaran HIV/Aids dan penyakit jangka panjang lainnya seperti tuberkulosis dan malaria;
- 7) Menjamin kelestarian lingkungan;
- 8) Membentuk kemitraan pembangunan global.

Namun, MDGs selesai pada tahun 2015, karena program MDGs sulit dilaksanakan di beberapa negara..

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) muncul dari pertemuan yang diadakan pada tanggal 25-27 September 2015, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, menyusul kesimpulan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). 193 negara berpartisipasi dalam acara tersebut, yang menghasilkan kesepakatan untuk meratifikasi dokumen SDGs. Acara ini merupakan kelanjutan dari penyelesaian rekor SDGs pada 2 Agustus 2015 yang

berlokasi di New York. Sekitar waktu itu, 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengubah Dunia Kita: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Tahun 2030". Dokumen yang dikenal sebagai (SDGs) dibuat dengan maksud membangun keberhasilan Tujuan (MDGs) sebelumnya dan mendorongnya ke depan (Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, 2016)

17 tujuan umum SDG adalah sebagai berikut: mengatasi perubahan iklim, melindungi ekosistem laut dan darat, mengurangi ketimpangan, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memerangi ketimpangan, menjaga ekosistem laut dan darat, membangun lembaga perdamaian dan keadilan yang kuat, membentuk kemitraan untuk mencapai tujuan, mempromosikan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, memastikan akses air bersih dan sanitasi, memastikan energi bersih dan terjangkau, memastikan pekerjaan yang layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi "*Leave No One Behind*" adalah prinsip panduan SDGs. Oleh karena itu, SDGs bersifat "universal", yang artinya berlaku untuk semua negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk negara maju, berkembang, dan miskin, selain negara berkembang. Indonesia.

Kepala Negara dan Pemerintahan yang menyetujui SDGs berjanji untuk menghancurkan kemiskinan, membunuh kelaparan, mengupayakan sifat kesejahteraan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi kesenjangan. Selain itu, rencana pembangunan ini menjamin tidak ada seorang pun yang tertinggal di tahun 2030. Untuk mewujudkannya, 17 rencana SDGs telah ditetapkan. Dokumen SDGs

2030 mencakup 169 target dan 241 indikator untuk mencapai 17 tujuan tersebut. Target dan tujuan SDGs direncanakan untuk mencapai hasil kemajuan yang mewakili kemajuan dalam menghancurkan kebutuhan dan nafsu makan, mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara, mengembangkan lebih jauh eksekutif dan teknik air, dan menemukan cara yang signifikan untuk menangani perubahan lingkungan. Empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan mencerminkan hal ini. Secara umum, target, tujuan, dan pilar SDGs juga berlaku untuk tujuan pembangunan daerah dan nasional.

SDGs dengan cakupan global diratifikasi di Indonesia dalam konteks nasional. Selain itu, metodologi yang dilambangkan dalam Aturan Bantuan memerlukan latihan pengarusutamaan di setiap rencana permainan yang berbeda dan usaha dari spesialis dan kaki tangan publik, dari populasi umum hingga tingkat kota. Agenda pembangunan nasional saat ini mencakup Sustainable Development Goals (SDGs). Sejak saat itu, SDGs telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan di berbagai daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, desa memiliki banyak potensi untuk membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai Keppres No. 59 Tahun 2017 Desa harus diintegrasikan dalam pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, target pembangunan desa sampai tahun 2030 dapat ditetapkan agar desa dapat mewujudkan 18 tujuan pembangunan desa yaitu; desa bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, warga desa yang sehat, desa yang bebas dari ketakutan dan kekerasan, desa dengan literasi

universal, desa yang mampu menjamin hak asasi manusia atas air minum dan sanitasi yang aman, desa sebagai habitat manusia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta desa yang penduduknya saling memberikan penghormatan universal terhadap hak asasi dan martabat penduduk lainnya, supremasi hukum, keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi, menghormati ras, etnis, dan keragaman budaya.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih ada di negara berkembang seperti Indonesia dan menjadi beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang signifikan dan rumit yang membutuhkan perhatian segera. Di Indonesia, kemiskinan terutama disebabkan oleh tingginya ketimpangan sosial akibat kemakmuran yang tidak merata. Tidak hanya itu, kemiskinan juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, kesempatan kerja yang lebih sedikit, dan politik yang tidak stabil.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, sebagaimana kemiskinan yang saat ini menjadi masalah di Indonesia, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sebagai aturan umum, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, isu upah rendah dan kemiskinan merupakan isu signifikan dalam pergantian peristiwa moneter. Inti dari melakukan perbaikan keuangan adalah untuk memahami perkembangan individu melalui kemajuan keuangan mengatasi berbagai peristiwa dan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk memenuhi syarat asuransi jiwa dianggap sebagai kemiskinan. Salah satu indikator terpenting tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah kemiskinan. Angka kemiskinan di suatu wilayah digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut secara agregat (Todaro & Smith, 2006).

Kelaparan dan kemiskinan saling berhubungan. Pada tahun 2000, masyarakat internasional mengangkat dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) bahwa komponen pertama adalah untuk mengurangi separuh populasi penduduk miskin yang hidup dengan satu dollar sehari dan mengurangi penduduk yang menderita kelaparan. Setelah masing-masing diukur, hal itu meninjau kemajuan ekonomi yang dicapai hingga saat ini. Kelaparan, komponen kedua dari MDGs, yaitu disaat kekurangan makanan memerlukan makanan yang cukup dari segi kuantitas, kualitas, dan keragaman makanan. Efeknya berhubungan erat dengan hasil kesehatan. Dampak dari kelaparan adalah kehilangan energi, apatis, meningkat kerentanan terhadap penyakit, kekurangan dalam status gizi, kecacatan, dan kematian. Meskipun kelaparan sebagian didorong oleh kemiskinan, ada faktor lain yang berhubungan dengan akses ke kesehatan dan pendidikan dan juga faktor penting lainnya adalah malnutrisi. Lebih dari 50 persen penduduk Negara berkembang yang kelaparan hidup di pertanian dan peternakan kecil yang terhubung ke ekonomi pedesaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekdes dan Pembimbing SDGs Desa Sukajadi pada saat pra penelitian mengungkapkan bahwa awal mula SDGs desa adalah untuk mendeteksi permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat

desa. Selanjutnya membuat kesimpulan dengan membuat target rekomendasi untuk dialokasikan pada tahun berikutnya. Permasalahan – permasalahan tersebut salah satunya adalah tingkat kemiskinan dan kelaparan, kemudian menjadi target rekomendasi dengan beberapa kategori seperti BLT, PKH dan BNPT.

Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SDGs/TPB. Desa Sukajadi memiliki total penduduk 4.943 jiwa dengan total keluarga/KK 1.682 keluarga. Salah satu hasil penerapan SDGs di Desa Sukajadi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penerapan SDGs di Desa Sukajadi pada poin Desa Tanpa Kemiskinan

INDIKATOR	CAPAIAN	INDIKATOR	CAPAIAN
Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	60	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100
Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	N/A	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0
		Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	11.11

Sumber : *sid.kemendesa.go.id*

Berdasarkan tabel diatas, penerapan SDGs di Desa Sukajadi pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum terprogram secara optimal SDGs di Desa Sukajadi. Pengurus desa dan perangkat pejabat desa belum menentukan langkah – langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan SDGs pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, tentunya memiliki peran atau fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan desa diharapkan dapat

membantu dalam membangun suatu pemerintahan. Oleh karena itu penerapan SDGs Desa menjadi salah satu langkah untuk menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

SDGs Desa menjadi langkah pembangunan nasional. SDGs telah banyak diterapkan di desa. Hal tersebut menjadikan SDGs sebagai langkah pemerintah dengan menggunakan unit desa untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik. Berikut data desa yang telah melaksanakan SDGs:

Tabel 1.2
Data Penerapan SDGs pada poin Desa Tanpa Kemiskinan

Indikator	Desa Sukaraharja	Desa Sukasetia
	Capaian	Capaian
Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	71.25	3.19
Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	85.47	3.19
Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	39.13	14.29
Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	4.17	5.56
Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	64	69.57
Individu miskin mendapat layanan kesehatan	92.16	N/A
Individu miskin mendapat pendidikan SD	95.12	70
Individu miskin mendapat pendidikan SMP	76.47	100
Individu miskin mendapat pendidikan SMA	100	50
Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	1.55	3.17
Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/NonPLN)	100	95.65
Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak	81	100
Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh subjektif	87	100
Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh objektif	99	100

Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	N/A	N/A
---	-----	-----

Sumber : *sid.kemendesa.go.id*

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa yang telah melaksanakan SDGs memiliki perubahan yang signifikan. Sebagai contoh pada poin keluarga miskin pengguna listrik (PLN/Non PLN) hampir seluruhnya telah mendapatkan, sehingga dapat diartikan bahwa keluarga miskin tidak kekurangan akan sumber energi listrik. Oleh karena itu, unit desa sebagai salah satu perangkat pemerintahan berhasil melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pemerintahan.

Tabel 1.3

Data Penerapan SDGs pada poin Desa Tanpa Kemiskinan

Indikator	Desa Sukaraharja	Desa Sukasetia
	Capaian	Capaian
Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	99.7	99.74
Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	0	0
Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	24.68

Sumber : *sid.kemendesa.go.id*

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa yang telah melaksanakan SDGs memiliki perubahan yang signifikan. Sebagai contoh pada poin prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% mendapatkan capaian 99. Artinya, hampir seluruhnya telah mendapatkan penanganan terhadap permasalahan poin tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa keluarga kelaparan yang ditandai dengan kurang gizi, stunting, anemia sudah tidak terdapat pada kedua

desa tersebut. Oleh karena itu, unit desa sebagai salah satu perangkat pemerintahan berhasil melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pemerintahan.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Linggarwati 2021 dengan judul Implementasi Sdgs Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas telah mendapatkan hasil yang baik. Meskipun beberapa dari 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) paling baik dicapai oleh masyarakat miskin karena keterbatasan aset dan berbagai keterbatasan fisik dan mental, temuan menunjukkan bahwa Desa Pandak telah berhasil melaksanakan SDGs. Keberhasilan Pandak Desa dalam mengimplementasikan SDGs didukung oleh pola kepemimpinan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, serta memaksimalkan potensi kesejahteraan masing-masing desa dan pencapaian tujuan SDGsnya. menyelesaikan semua 18 SDGs, meskipun beberapa tujuan belum tercapai. belum dilaksanakan secara ideal karena aset yang terbatas dan berbagai keharusan di dalam dan di luar. Gaya kepemimpinan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, serta memaksimalkan potensi setiap desa untuk kesejahteraan dan pencapaian SDG desa menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi SDGs di Desa Pandak.
2. Pratama 2020 dengan judul *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan hasil bahwa Daerah Yogyakarta sebagai salah satu daerah paling malang di pulau Jawa memiliki beberapa tujuan dan proyek yang dilakukan untuk

mengatasi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah masalah multifaset, program ini melibatkan sejumlah organisasi terkait. Untuk tahun 2017 hingga 2022, program-program tersebut masuk dalam RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Romli (2017) dengan judul Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) yang berfokus pada proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia yang lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
4. Sumiati (2018) dengan judul Upaya Southeast Asian Ministers of Education (SEAMEO) dalam mewujudkan SDGs Poin 4.2 Periode 2017-2018. Penelitian program SEAMEO tentang mewujudkan SDG poin 4.2 menemukan bahwa bidang penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, advokasi, dan kemitraan sesuai untuk implementasi SDGs dalam pendidikan anak usia dini. Semua anak akan mendapat manfaat dari penyediaan pendidikan yang adil dan layak sehingga mereka dapat

keluar dari kemiskinan, merasa aman, dan berkembang menjadi orang dewasa yang produktif.

5. Pedersen (2018) dengan judul *The UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a great gift to business!*. Setiap bisnis memiliki pendekatan unik dalam implementasi SDGs yang disesuaikan dengan permasalahan dan sumber dayanya, salah satunya melalui program CSR bekerja sama dengan pemerintah dan mitra bisnis lainnya. Temuan penelitian SDGs akan memberikan panduan bagi perusahaan untuk mengurangi risiko dan biaya. Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam pencapaian SDGs, ekspansi pasar yang cepat dan signifikan akan didorong.

Masih banyak lagi penerapan SDGs yang telah dilaksanakan di Desa Sukajadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait hasil penerapan SDGs Desa yang dilaksanakan di Desa Sukajadi, sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“Optimaliasasi Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penerapan *Sustainable Development Goal’s* Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi fungsi pemerintahan desa pada penerapan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan ?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar SDGs.
2. Informasi yang diteliti pada penelitian ini hanya tujuan SDGs pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui Optimaliasasi Program *Sustainable Development GoalsDesa* (SDGs Desa) Desa di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori.

Manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. ManfaataTeoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang Optimalisasi fungsi desa pada program *Sustainable Development GoalsDesa* (SDGs Desa) di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong

Kabupaten Tasikmalaya dari perspektif Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan membantu pelaksanaan program *Sustainable Development Goals Desa* (SDGs) Desa di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.